

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)

Rapat ke : 7 (tujuh)
Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu RI, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag RI, dan Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI.
Hari, Tanggal : Senin, 21 Januari 2019
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Asril Hamzah Tanjung, S.I.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : Penjelasan para Dirjen terkait dengan ketentuan baru (Biometrik) proses pembuatan visa Haji dan Umroh.
Hadir : 1. orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI
2. a. Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu RI, Andri Hadi;
b. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag RI, yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Umroh dan Haji Khusus, M Arfi Hatim, M.Ag;
c. Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, yang diwakili oleh Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Cucu Koswala;
d. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang diwakili oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Ir. Yuliot
beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. RDP Komisi I DPR RI dengan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu RI, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag RI, dan Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah Tanjung, S.I.P.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai ketentuan baru (rekam Biometrik) proses pembuatan visa Haji atau Umroh. Berkaitan dengan hal itu, Komisi I DPR RI mendorong Kemlu, Kemenag, Kemenkumham, dan BKPM bersama-sama untuk meminta dan mendesak Pemerintah Arab Saudi menunda pelaksanaan kebijakan rekam Biometrik sebagai syarat pembuatan visa Haji atau Umroh di Indonesia.
2. Penundaan pelaksanaan kebijakan rekam Biometrik sebagai syarat pembuatan visa Haji atau Umroh tersebut dilaksanakan sampai tersedianya infastruktur, SDM, dan mekanisme yang mempermudah calon Jamaah Haji atau Umroh dari Indonesia.
3. Komisi I DPR RI mendorong Pemerintah dalam hal ini Kemlu, Kemendagri, Kemenkumham serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk memberikan jaminan perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia dalam pengajuan visa di seluruh perwakilan asing di Indonesia.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.05 WIB.

Jakarta, 21 Januari 2019
KETUA RAPAT,

TTD.

ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P.
A-340